

mendistribusikan laba. Pengusaha nirlaba (*non-profit entrepreneur*) sering kali didorong oleh aspek sosial (*driven by social*) atau kehendak ideologis, bukan dorongan mendapatkan uang.

2. Struktur tata kelola organisasi nirlaba memiliki struktur tata kelola yang berbeda dengan perusahaan institusi pemerintahan, dimana tidak dipilih secara publik dan jarang dari mereka yang digaji. Selain itu terdapat unit dan jenis yang berbeda yang dikelola.
3. Struktur penerimaan yang diperoleh berdasarkan sumber penerimaan organisasi nirlaba berbeda dengan perusahaan dan institusi pemerintahan. Sebagian dari penerimaannya diterima secara sukarela dari donasi. Donasi ini membutuhkan strategi penggalangan dana yang berbeda serta orientasi pasar yang berbeda
4. Sebagian besar pegawai (*staffing*) organisasi nirlaba bekerja juga secara sukarela dan berdasarkan kebutuhan.
5. Sumber pendanaan nirlaba tidak membagikan untung, maka tidak ada penarikan modal kepemilikan (*equity capital*)
6. Organisasi nirlaba lebih bersifat mandiri dan tidak terpengaruh oleh tekanan publik

7. Organisasi nirlaba memiliki transaksi yang tidak dapat diakomodasi oleh sektor bisnis yaitu adanya belanja konsumsi dan penerimaan suatu bentuk pembayaran yang bersifat donasi.

2.3 Organisasi Gereja

2.3.1 Organisasi Keagamaan

Menurut Mahsun (2006), organisasi keagamaan termasuk ke dalam tipe organisasi nirlaba karena fokusnya adalah pelayanan publik non-komersial. Dalam konteks publik, organisasi keagamaan juga memikul tanggung jawab akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana yang berasal dari publik (umat).

Pendapat tersebut diperkuat oleh Bastian (2007) dalam Halim (2012: 453) yang menyatakan bahwa tempat ibadah dapat dikategorikan sebagai organisasi keagamaan. Secara bahasa, organisasi keagamaan dipahami sebagai lembaga yang menjalankan aktivitas utamanya dalam ruang lingkup keagamaan, termasuk penyelenggaraan ibadah serta pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang bersumber dari ajaran atau sistem kepercayaan tertentu.

2.3.2 Gereja

Gereja sebagai organisasi keagamaan dituntut untuk memiliki sifat terbuka dan dituntut untuk melaksanakan praktik akuntabilitas. Gereja saat ini merupakan organisasi yang mempunyai sasaran-sasaran pokok. Menurut Mangunwijaya (2003) sasaran pokok gereja sebagai organisasi adalah:

1. Umat yang rapi tersusun, rohani maupun jasmani
2. Tumbuh serba segar, vital, dan sangguo bertahan
3. Menjadi tempat kediaman Allah yang kudus di dalam Roh

Di sekitar perkara tiga perkara pokok tersebut, menjadi ukuran organisasi gereja dari keuskupan, paroki, stasi, dan lingkungan umat gereja. Gereja harus memiliki sifat keikhlasan, kesukarelaan, kesetiakawanan, kekeluargaan, dan kesucian terhadap sesama

2.3.3 Gereja Katolik

Dalam Lumen Gentium yang dikeluarkan oleh KWI Indonesia (1990) dipahami sebagai organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan materi, melainkan didasari pada keputusan Ilahi untuk keselamatan umat manusia. Gereja hadir untukewartakan injil, melayani sesama, dan menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah secara nyata melalui sakrame, pelayanan pastoral, serta karya sosial.

Gereja katolik memandang organisasi bukan semata-mata sebagai struktur teknis atau administratif, melainkan sebagai suatu wadah yang memungkinkan manusia bekerja sama dengan tertib dan terarah demi mencapai kebaikan bersama. Dalam pandangan iman katolik, struktur organisasi, termasuk di dalamnya tata kelola, hierarki, dan pembagian tugas. Struktur di dalam greja bukan sekedar melayani fungsi adminitratif, tetapi juga dimensi spiritual dan pelayanan.

2.4 Akuntabilitas

2.4.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah konsep yang merujuk pada perorangan atau organisasi untuk memberikan pertanggung jawaban atas tindakan, keputusan dan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini melibatkan transparansi, kejujuran, keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan. Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemegang amanah kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo 2018).

Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa akuntansi merupakan proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

2.4.2 Jenis-jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep yang mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomi dan efisiensi tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban. Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks, terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi.

Pada dasarnya akuntabilitas adalah sebuah rantai atau siklus yang saling terhubung satu sama lain dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Siklus perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi ini diperjelas dengan pendapat Mahsun (2018) sebagai berikut:

1. Perencanaan adalah sebuah proses untuk menentukan tindakan-tindakan kedepannya dengan tepat dan suatu bentuk antisipasi berdasarkan tujuan yang ditetapkan
2. Realisasi merupakan pelaksanaan anggaran yang telah direncanakan dalam bentuk program yang nyata sebagai bentuk operasionalnya
3. Pelaporan keuangan merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam bentuk sebuah laporan selama periode tertentu
4. Evaluasi

Evaluasi berfungsi sebagai umpan balik bagi seluruh proses sebelumnya (perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan). Dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan organisasi ke depannya

2.4.3 Akuntabilitas Pada Gereja

Pada gereja diperlukannya pencatatan yang mencatat segala aktivitas untuk mengontrol setiap penerimaan, pendapatan dan pengeluaran sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dalam hal ini diperlukan laporan keuangan transparan. Transparan yang dimaksudkan adalah keterbukaan dan kejujuran dalam mengelola sumber daya. Gereja harus memupuk sikap keterbukaan, transparan dan mengikuti peraturan-peraturan secara konsekuen dalam pengelolaan keuangan, serta melibatkan seluruh persekutuan dalam perencanaan dan pengadaan keuangan (Ladjar 2009)

Menurut (Fransiskus Randa 2010) transparansi dan akuntabilitas tidak hanya mencakup pada laporan keuangan yang jelas dan tepat tetapi sesuai dengan standar pedoman yang berlaku serta memberikan gambaran yang akurat tentang posisi keuangan dan kinerja pada entitas tersebut. Pendapat sebelumnya diperkuat dengan pendapat dari (Sukmawati, Pujiningsih, and Laily 2016) akuntabilitas dilakukan untuk menghindari tindakan pencurian uang jemaat serta merupakan bentuk dari penyampaian kinerja yang dilakukan dalam mengelola uang, selain itu sebagai media komunikasi antara bendahara dan jemaat mengenai kondisi keuangan gereja yang ada.

2.5 Siklus Akuntansi

2.5.1 Perencanaan

Menurut Mahsun (2018) perencanaan atau penyusunan anggaran mencakup tahapan sistematis yang bertujuan untuk menyusun perencanaan penggunaan sumber daya keuangan. Perencanaan dimulai dengan penetapan tujuan dan sasaran dalam periode tahun tertentu yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Berikutnya dilakukan perkiraan biaya yang akan digunakan pada suatu kegiatan.

Penyusunan anggaran juga melibatkan proses estimasi terhadap pendapatan, baik dari sumber internal maupun eksternal. Rancangan anggaran yang telah disusun selanjutnya dibahas dan disepakati oleh pihak yang berwenang sebelum ditetapkan menjadi dokumen anggaran resmi. Dalam organisasi publik maupun nirlaba, proses penyusunan anggaran idealnya dilakukan secara partisipatif, transparan, dan berdasarkan prinsip akuntabilitas, agar mampu mencerminkan kebutuhan riil dan prioritas pelayanan kepada masyarakat atau umat.

2.5.2 Realisasi

Menurut Mahsun (2006), realisasi anggaran adalah tahap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana berdasarkan anggaran yang telah direncanakan dan disetujui. Pada tahap ini, semua rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran mulai dijalankan, baik dari sisi kegiatan fisik maupun penggunaan anggarannya.

Realisasi menjadi cerminan dari seberapa jauh anggaran yang telah disusun benar-benar dilaksanakan secara efektif dan efisien. Mahsun menekankan bahwa dalam tahap ini, diperlukan adanya pengendalian pelaksanaan anggaran, agar penggunaan dana tidak melenceng dari peruntukannya dan tetap sesuai dengan tujuan organisasi.

Selama pelaksanaan, semua transaksi pengeluaran dan pemasukan yang terjadi harus dicatat secara sistematis dan terdokumentasi, serta dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung (seperti kuitansi, faktur, nota, atau surat tugas). Ini penting sebagai dasar pertanggungjawaban di akhir periode.

2.5.3 Pelaporan

Menurut Mahsun (2006), pelaporan merupakan salah satu tahap krusial dalam siklus manajemen keuangan sektor publik. Pelaporan dilakukan setelah tahap pelaksanaan anggaran selesai, dengan tujuan utama untuk menyampaikan informasi keuangan yang lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks organisasi publik atau nirlaba, pelaporan keuangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial terhadap penggunaan dana yang berasal dari masyarakat atau umat. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disusun secara sistematis, berbasis pada data realisasi anggaran, dan didukung oleh bukti transaksi yang sah.

Mahsun menekankan bahwa pelaporan yang baik harus memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi, sehingga dapat menunjukkan sejauh mana anggaran yang telah direncanakan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Laporan ini juga menjadi alat evaluasi kinerja keuangan organisasi, yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku. Secara umum, laporan keuangan dalam sektor publik terdiri dari beberapa komponen, yaitu: laporan realisasi anggaran, yang membandingkan antara anggaran dan realisasi aktual; neraca, yang mencerminkan posisi keuangan pada akhir periode; laporan arus kas, yang menggambarkan aliran masuk dan keluar dana; serta catatan atas laporan keuangan, yang memberikan penjelasan tambahan atas pos-pos keuangan yang disajikan.

2.5.4 Evaluasi

Menurut Mahsun (2006), evaluasi merupakan tahap terakhir dalam siklus pengelolaan keuangan sektor publik yang berfungsi untuk menilai sejauh mana anggaran telah digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peruntukannya. Evaluasi tidak hanya berfokus pada realisasi keuangan, tetapi juga mencakup penilaian terhadap pelaksanaan program, keluaran (output) yang dihasilkan, serta dampak (outcome) dari penggunaan anggaran tersebut. Dengan kata lain, evaluasi bertujuan untuk menjawab pertanyaan: apakah yang direncanakan benar-benar dilakukan, dan apakah yang dilakukan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan organisasi.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan di awal (dalam dokumen anggaran) dengan realisasi di lapangan. Ini mencakup penilaian atas keakuratan laporan keuangan, efisiensi penggunaan dana, serta ketercapaian sasaran program. Mahsun menekankan bahwa evaluasi tidak bisa dipisahkan dari prinsip akuntabilitas dan transparansi, karena dari sinilah pihak yang diberi kewenangan (seperti pengurus atau bendahara) mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan keuangannya kepada pihak yang memberi mandat (misalnya umat, keuskupan, atau publik).

2.6 Definisi Penatausahaan

Penatausahaan dapat disimpulkan sebagai langkah awal dan penting dalam siklus pengelolaan keuangan yang mencakup aktivitas keuangan atau proses administratif terkait pencatatan, pembukuan, pengelompokan serta pengarsipan dokumen transaksi keuangan yang dilakukan secara sistematis dan teratur. Menurut Zahra dkk. (2024) Penatausahaan anggaran ini menunjuk pada proses administrasi dan pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan serta pelaporan anggaran tersebut. Penatausahaan merupakan prosedur yang terstruktur untuk melakukan pengaturan dan memastikan kelancaran dan pemanfaatan penganggaran. Pendapat sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2018) Penatausahaan adalah proses pencatatan dan pengendalian transaksi keuangan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir untuk mendukung penyusunan laporan keuangan yang akuntabel.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara menjelaskan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dapat terwujud dengan penatausahaan dan pertanggungjawaban di mana pelaporan harus dilaporkan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi yang ditetapkan

2.6.1 Unsur-unsur Penatausahaan

Berdasarkan Permendagri nomor 19 nomor 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah yang terkhusus Bab XV disebutkan penatausahaan adalah kegiatan administratif yang meliputi pembukuan, inventaris, dan pelaporan atas seluruh barang milik daerah dan bertujuan untuk memastikan bahwa barang daerah tercatat benar, tertib, dan akuntabel. Penatausahaan keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk laporan keuangan yang andal, transparan, dan akuntabel dengan tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan berprinsip efisiensi dan efektivitas. Penatausahaan mendukung akuntabilitas karena penatausahaan menuntut adanya bukti yang berasal dari pencatatan. Menurut Kartika Sari dan Widyawati (2021) harus adanya pencatatan setiap adanya penerimaan dan pengeluaran dan juga melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Penatausahaan adalah proses dokumentasi dari transaksi yang telah direalisasikan. Tanpa adanya realisasi, tidak ada bukti yang bisa dicatat atau diadministrasikan dan tanpa adanya penatausahaan realisasi yang telah dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2.6.2 Penatausahaan Pada Gereja

Dijelaskan secara rinci oleh Ladjar (2009) penatausahaan pada gereja adalah serangkaian kegiatan administratif sebagai berikut:

1. pencatatan kas masuk dan keluar

Pencatatan dilakukan setiap ada kas yang masuk (kolekte, sumbangan dan dana umat) dan kas yang keluar (biaya listrik, konsumsi, bantuan sosial, kegiatan kategorial, dll)

2. dokumentasi dan bukti transaksi

Setiap transaksi harus disertai bukti fisik seperti nota, kuitansi, atau surat tanda terima yang disertai tanda tangan penerima dan pemberi dana serta foto kegiatan jika ada. Seluruh dokumen ini diarsipkan secara kronologis, dan akan digunakan sebagai bahan dalam evaluasi

3. penyusunan laporan dan evaluasi

laporan keuangan dibagi menjadi 2 yakni laporan bulanan untuk dewan keuangan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada umat dan keuskupan

2.7 Laporan Keuangan

2.7.1 Pengertian dan Tujuan Laporan keuangan

laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan

keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan (pihak internal perusahaan), laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakaian eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu untuk pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan Mahsun (2018)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang organisasi yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Keputusan tersebut termasuk pembelian, penjualan, atau kepemilikan instrumen ekuitas dan instrumen utang, serta penyediaan atau penyelesaian pinjaman dan bentuk kredit lainnya

Menurut Mardiasmo (2018) secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan adalah:

1. Kepatuhan dan pengelolaan

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum

2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan digunakan untuk memonitor kinerja dan evaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren, dan sebagai pembandingan

3. Perencanaan dan otorisasi

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa depan

4. Kelangsungan organisasi

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi dapat meneruskan kinerja dimasa mendatang

5. Hubungan masyarakat

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang dicapai

6. Sumber fakta dan gambaran

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengenal lebih dalam.

2.7.2 Keuangan Paroki

Menurut (Jehaut n.d.) paroki dapat dan harus mengelola keuangan yang dimilikinya, keuangan paroki berasal dari umat gereja itu sendiri. Keuangan yang dimaksudkan berasal dari umat berupa sumbangan

sukarela, kolekte, administratif pelayanan sakramen dan surat menyurat, serta iuran wajib.

Pengelolaan keuangan paroki merupakan tugas gerejawi atau komunitas dengan kata lain, tugas pengelolaannya tidak pernah menjadi tugas privat melainkan melibatkan komunitas umat beriman secara keseluruhan, yang secara yuridis diwakili oleh organ partisipatif dan konsultatif yang keberadaannya di akui dalam Gereja.

2.7.3 Menyelenggarakan Keuangan yang Sehat

Untuk mencapai keuangan yang sehat, Keuskupan Jayapura menjelaskan secara rinci sistem keuangan dalam buku yang (Ladjar 2009) sebagai berikut

1. Gambaran umum administrasi Paroki

Dalam menjalankan administrasi keuangan pada umumnya dan secara khusus diperlukan prangkat administrasi keuangan sesuai dengan situasi setempat yang terdiri atas:

- a. Buku kas
- b. Buku bank
- c. Buku inventaris
- d. Pengarsipan

2. Pelaksanaan pembukuan

- a. Buku kas

Buku kas adalah buku di mana dicatat secara rutin, benar dan teratur segala transaksi atau kegiatan keuangan pada saat keluar dan masuknya uang tunai

b. Buku bank

Buku bank mirip dengan buku kas, hanya pihak bank yang menyelenggarakannya pembukuan secara tersendiri. Dalam pelaksanaan pembukuan, bukti pembukuan merupakan alat yang menunjukkan kebenaran terjadinya transaksi keuangan paroki. Guna memberikan bukti yang baik dan benar alangkah baiknya jika digunakan buku kuitansi

c. Buku inventaris

Buku ini adalah buku untuk mengetahui segala hal yang menjadi milik paroki yang merupakan aset keuskupan, baik yang dibeli paroki maupun yang disumbang oleh umat dicatat sebagai inventaris. Inventaris peroki dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Barang tidak gerak

Misalnya gedung dan tanah

2) Barang yang gerak

a) Yang habis pakai dalam jangka waktu dekat (misalnya anggur, hosti, lilin, ember, lap, dll)

b) Yang habis dipakai dalam jangka waktu lama (misalnya meja dan kendaraan)

d. Pengarsipan

Pengarsipan dapat dikategorikan menjadi 2 bagian:

- 1) Pengarsipan bukti transaksi keuangan (kuitansi, lembar buku kas, dll)
- 2) Pengarsipan surat-surat berharga (akte jual beli, surat-surat kendaraan, dll)

e. Perbaikan/ralat

Jika terjadi kesalahan salah tulis dan memerlukan perbaikan, maka buku kas maupun kuitansi tidak boleh dihapus untuk memperbaiki yang salah. Perbaikan yang benar adalah dengan cara bagian yang salah di garis dan perbaikan ditulis di atasnya.

Keuskupan Jayapura mewajibkan paroki supaya menyelenggarakan pembukuan secara terbuka, memberikan laporan keuangan setiap triwulan dan tahunan dan menyusun RAPB tahunan secara konsisten.

Pedoman keuangan Keuskupan Jayapura menjelaskan mengenai tahap-tahap menyusun laporan keuangan sebagai berikut:

1. Pada akhir periode laporan, setiap bendahara mengumpulkan semua transaksi yang berhubungan dengan kode pembukuan
2. Transaksi-transaksi tersebut dijumlahkan baik debit maupun kredit
3. Selanjutnya menentukan saldo dari masing-masing kode
4. Setiap kode yang telah diperhitungkan dapat direncanakan dalam “kertas laporan” dengan menyebutkan saldo akhir dari bank dan kas
5. Saldo ini dipindahkan ke laporan berikutnya

Pembuatan laporan terbagi menjadi 3 yakni laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.

2.8 Analisis SWOT Pada Gereja

Analisis SWOT merupakan salah satu pendekatan dalam manajemen strategis yang digunakan untuk menilai kondisi internal dan eksternal suatu organisasi agar dapat merumuskan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan. Menurut (Pangaribuan (2014), analisis SWOT adalah “proses sistematis untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal organisasi, guna menentukan langkah strategis yang realistis.” Sementara itu, Boya and Chiloane-Phetla (2022) menegaskan bahwa analisis SWOT pada organisasi gereja membantu lembaga keagamaan memahami posisi dan kemampuannya dalam

menghadapi tantangan modern, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan akuntabilitas pelayanan. Dengan demikian, analisis SWOT tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan administratif, tetapi juga sebagai sarana refleksi untuk memperkuat nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi nirlaba keagamaan. Analisis SWOT dapat diterapkan untuk sistem tata kelola keuangan dengan mempertimbangkan dimensi spiritual, sosial, dan administratif. Gereja sebagai organisasi nirlaba memiliki karakteristik unik karena tujuannya bukan mencari laba, melainkan melayani umat dan mempertanggungjawabkan setiap dana yang dipercayakan kepadanya. Oleh sebab itu, sebagaimana dijelaskan oleh (Mahsun 2018) setiap organisasi publik—termasuk lembaga keagamaan—memerlukan sistem akuntabilitas yang dapat menjamin keterbukaan, kejujuran, serta pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Analisis SWOT menjadi penting karena mampu memetakan kondisi aktual gereja dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.

Boya and Chiloane-Phetla (2022) menyebutkan bahwa kekuatan (*strengths*) gereja sering terletak pada komitmen moral, spiritualitas, dan loyalitas pelayan yang tinggi terhadap misi gereja. Kekuatan ini menjadi modal sosial yang dapat dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan umat. Dalam konteks Paroki Roh Kudus Mabilabol, kekuatan tersebut tampak pada kesediaan pengurus paroki dan umat untuk terlibat secara sukarela dalam setiap kegiatan keuangan gereja.

Sebaliknya, kelemahan (*weaknesses*) dalam pengelolaan keuangan gereja sering kali muncul karena keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pemahaman mengenai akuntansi, serta sistem pencatatan yang belum baku. Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa lemahnya kapasitas teknis pelaksana keuangan merupakan salah satu faktor penghambat dalam pencapaian akuntabilitas sektor publik. Kondisi tersebut juga relevan dengan realitas di beberapa paroki di wilayah Papua, termasuk Paroki Roh Kudus Mabilabol, di mana proses pencatatan masih dilakukan secara manual dan bergantung pada satu atau dua orang pengurus yang memiliki kemampuan administrasi lebih baik. Ketergantungan ini berisiko menimbulkan kesalahan pencatatan, kehilangan bukti transaksi, hingga keterlambatan pelaporan.

Sementara itu, peluang (*opportunities*) yang dapat dimanfaatkan gereja antara lain ialah adanya dukungan dari keuskupan untuk menerapkan sistem pelaporan digital, pelatihan keuangan bagi pengurus paroki, serta meningkatnya kesadaran umat akan pentingnya transparansi keuangan. Menurut Sutomo (2016), perubahan teknologi informasi dan meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi memberikan peluang besar bagi organisasi nirlaba untuk memperbaiki sistem pengelolaan dan pelaporannya. Dalam konteks Paroki Roh Kudus Mabilabol, peluang ini dapat diwujudkan melalui pelatihan teknis penggunaan perangkat digital sederhana dan pembiasaan pelaporan berbasis data agar pengelolaan keuangan lebih efisien dan dapat diakses oleh umat.

Adapun ancaman (*threats*) yang dihadapi gereja antara lain menurunnya kepercayaan umat jika laporan keuangan tidak disampaikan secara terbuka, lemahnya sistem pengawasan internal, serta kondisi geografis dan sosial yang menyulitkan proses dokumentasi dan distribusi laporan. Boya and Chiloane-Phetla (2022) menyoroti bahwa kehilangan kepercayaan publik terhadap lembaga keagamaan dapat menjadi ancaman terbesar karena hal itu akan berdampak langsung pada partisipasi dan dukungan umat. Oleh karena itu, upaya penguatan sistem pengawasan dan penyusunan laporan yang tepat waktu menjadi langkah penting untuk menghindari ancaman tersebut.

Dengan menerapkan analisis SWOT, gereja dapat mengembangkan strategi akuntabilitas keuangan yang lebih komprehensif, yaitu dengan cara memanfaatkan kekuatan internal untuk mengatasi kelemahan, serta menggunakan peluang eksternal untuk menghadapi ancaman. Sebagaimana dijelaskan oleh Pangaribuan (2014), hasil analisis SWOT hendaknya menjadi dasar dalam perencanaan strategis gereja, baik untuk penguatan sumber daya manusia, pengembangan sistem pencatatan, maupun peningkatan partisipasi umat dalam pengawasan keuangan. Analisis ini juga berperan dalam membantu pimpinan gereja melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang dijalankan. Analisis SWOT tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai sarana refleksi spiritual dan moral dalam memastikan bahwa setiap dana yang dipercayakan umat digunakan secara bertanggung jawab. Penerapan SWOT di Paroki Roh Kudus Mabilabol

dapat membantu pihak paroki mengidentifikasi kondisi nyata yang dihadapi, memperkuat struktur pelaporan keuangan, dan mempersiapkan diri menuju sistem akuntabilitas yang lebih transparan serta sesuai dengan tuntutan pastoral gereja modern.



2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nomor	Judul	Peneliti dan tahun meneliti	Variabel	Metodologi	Hasil penelitian
1	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Gereja Toraja pada Jemaat Rembon	Lindayanti Bisara, Olivia Devi Yulian Pompeng, Elisabet Pali (2024)	Transparansi dan Akuntabilitas	Kualitatif deskriptif, wawancara dan dokumentasi, analisis komparatif	1. Laporan keuangan masih berupa laporan keuangan yang sederhana dan dilaporkan setiap minggunya 2. Laporan yang dibuat sebatas laporan penerimaan tidak ada laporan pengeluaran yang menyebabkan akuntabilitas rendah 3. Belanja gereja ditujukan untuk operasional namun tidak disertai dokumentasi

2	Manajemen Keuangan Gereja Perspektif Akuntabilitas Vertikal dan Horisontal di GKPB Galang Ning Sabda Badung	I Wayan Susrama, Ni L.P. Suarmi Sri Patni, I Made Darmayasa (2023)	Akuntabilitas vertikal dan horisontal, manajemen keuangan gereja	Kualitatif, pendekatan interpretif, wawancara, observasi, penelitian dokumentasi	1. 94,1% responden menyatakan yakin dengan pengelolaan keuangan dilakukan secara jujur berdasarkan peraturan gereja yang didasarkan pada firman Tuhan dan rasa takut akan Tuhan 2. Pendeta menyatakan semua pelayanan termasuk keuangan harus dianggap sebagai tanggung jawab rohani bukan sekedar administratif 3. Realisasi dan anggaran dilaporkan melalui rapat tahunan
---	---	--	--	--	---

					4. Laporan disusun setiap minggu, bulan dan tahun 5. Sistem keuangan sudah menggunakan <i>Excel worksheet</i> dengan format dari sinode
3	Akuntabilitas Gereja dalam Perspektif Alkitabiah dan Stewardship Theory	Franchisca Sukmawati, Sri Pujiningsih, Nujmatul Laily (2021)	Akuntabilitas vertikal dan horisontal, stewardship theory	Kualitatif, penelitian kasus, wawancara, dokumentasi, observasi tersembunyi	1. Akuntabilitas vertikal dilakukan dengan hati-hati, jujur, dan tanggung jawab praktik ini melihatkan ketaatan terhadap akuntabilitas dan ketaatan moral 2. Akuntabilitas horisontal dilaksanakan dengan menyusun dan menyampaikan

					laporan keuangan kepada jemaat. Laporan dilakukan setiap minggu dan setiap bulan
4	Akuntabilitas dan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan pada Gereja Toraja ABC	Marselinus Aditya Hartanto Tjungadi, Yan Rahadian (2020)	Akuntabilitas pelaporan keuangan, pengendalian internal	Kualitatif deskriptif, penelitian kasus tunggal	1. Proses pelaporan keuangan masih sederhana disebabkan belum memiliki standar pelaporan yang baku 2. Akuntabilitas hanya melalui laporan kas secara umum 3. Jemaat menyadari keterbatasan yang dihadapi sehingga belum ada keinginan untuk meningkatkan sistem akuntabilitas

5	Akuntabilitas Keuangan dalam Organisasi Keagamaan (Penelitian Kasus pada Gereja Kristen Injili Onomi Flavaauw, Sentani)	Gratiana H.D.P, Deodata Miraclin Yuliana S.K (2023)	Akuntabilitas keuangan gereja	Kualitatif deskriptif, penelitian kasus	1. Sudah ada sistem pencatatan keuangan namun masih menggunakan cara manual dan sederhana 2. Sistem akuntansi berbasis akuntansi masih sebatas pembukuan kas masuk dan keluar 3. Akuntabilitas terbatas disebabkan belum adanya standar pelaporan dan minimnya dokumentasi 4. Pengurus gereja tetap menunjukkan sikap bertanggungjawab dan jemaat tetap mempercayakan pengelolaan keuangan
---	---	--	-------------------------------	---	---

BAB III

METODE PENELITIAN DAN GAMBARAN ORGANISASI

3.1 Metodologi Penelitian

3.1.1 Obyek dan Metode Penelitian

Obyek penelitian merupakan Paroki Roh Kudus Mabilabol. Pemilihan obyek ini dikarenakan Paroki Roh Kudus Mabilabol mampu mengelola keuangan secara efektif dan mandiri untuk mendukung berbagai kegiatan pastoral dan operasional harian namun kurangnya sumber daya manusia yang paham akan pedoman keuangan dan sistem yang diterapkan keuangan.

Penelitian akan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk kata-kata dan tidak menggunakan angka-angka serta tidak menggunakan berbagai pengukuran. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2017) penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat enterpretif atau *postpositivisme* dan penelitian kualitatif bersifat naturalistik, induktif, enterpretif, *discovery*, dan konstruktif. Penelitian kualitatif bisa digunakan dalam berbagai pendekatan, antara lain: *ethnografi*, penelitian *naturalistic*, penelitian kasus, penelitian lapangan, pekerjaan teknis, dan pengamatan langsung. Pendekatan ini menggunakan bermacam-macam metodologi yang merupakan ciri dari penelitian kualitatif (Hermawan 2016). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian

secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Pendapat ini dikuatkan dengan pendapat dari (Sugiyono 2017) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan data dilakukan secara gabungan, dan hasil akan lebih menekankan pemahaman dan mengonstruksi fenomena dari pada generalisasi, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan keadaan satu atau lebih variable secara mandiri dengan cara mencari hubungan antar variabel (Sugiyono 2017)

3.1.2 Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer pada penelitian ini berupa jawaban responden atas wawancara kepada Pastor Paroki sebagai ketua umum, Ketua Dewan Pastoral Paroki, Sekretaris Dewan Pastoral Paroki, Bendahara Dewan Pastoral Paroki, dan perwakilan umat. Data primer akan didukung oleh laporan aktivitas, laporan arus kas gereja dan laporan posisi keuangan.

3.1.3 Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Pengumpulan data akan dilakukan langsung dan alamiah pada sumber data. Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif deskriptif di Paroki Roh Kudus Mabilabol sebagai berikut: